



DPKD

Provinsi Sulawesi Barat

RENCANA KERJA

2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu di perhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyusunan Renja Tahun 2023 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan dan merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang

merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kinerja melalui program kegiatan dan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, serta penyelamatan dan penataan dokumen arsip Daerah dan akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2023, yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Daerah Tahun 2023 adalah membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 - 2026 yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra selama 3 tahun menjadi tujuan dan sasaran 1 tahun.
- b. Sebagai panduan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Peyalanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Reviem Terhadap Rancangan Awal OPD, serta penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2023, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun. Namun dikarenakan tahun 2023 ini merupakan tahun awal renstra 2023-2026 dan penyusunan RENJA 2023 ini disusun masih tahun anggaran berjalan 2022 serta capaian data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan belum terserap/atau terlaksana 100% sehingga tidak bisa dijadikan bahan pembandingan/sandingan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam pelaksanaan Renja 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada 1 (satu) program/kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran yang tidak memenuhi yaitu Program Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi pada sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (DAK) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85 %.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelaksanaan Renja 2021 semua program telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yaitu pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Provinsi melalui Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling sebesar 116%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a. Kegiatan Pembangunan gedung layanan Perpustakaan tidak mencapai target kinerja karena ketidakmampuan pihak ketiga (kontraktor) menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan, meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak 2 kali perpanjangan waktu sehingga harus dilakukan pemutusan kontrak.
 - b. Kegiatan Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling melebihi target kunjungan perpustakaan baik melalui layanan dikantor maupun layanan perpustakaan keliling dikarenakan semakin berkurangnya penyebaran covid-19 dan tidak diberlakukannya lagi pembatasan aktivitas sehingga pelayanan ke

Sekolah – sekolah, tempat layanan kesehatan dan tempat rekreasi sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun 2017-2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut :
 - a. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan agar permasalahan yang timbul dalam tahap pelaksanaannya nanti dapat diminimalisir.
 - b. Mempertimbangkan dengan baik hasil rakor ataupun target pencapaian program/kegiatan yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melakukan penambahan SDM pada layanan perpustakaan keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat layanan perpustakaan.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut: *(Tabel 1 Terlampir)*.

Sesuai hasil evaluasi kinerja Tahun 2021 seperti yang diuraikan pada *Tabel 1 terlampir*, capaian indikator kinerja program dan kegiatan mencapai rata-rata sebesar **100** persen dan apabila dikonversi dalam nilai maka kategori kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2021 adalah **Baik (nilai 80 –100 = baik)**.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan dalam capaian kinerja setiap tahun.

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut : (*Tabel 2 Terlampir*)

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Ketersediaan SDM yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

2.3.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki DPKD di antaranya:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang diberikan kepada pengguna layanan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar yaitu belum adanya gedung layanan Perpustakaan yang representative serta belum adanya Depot Arsip;
3. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
4. Belum adanya Produk-Produk Hukum/ Perda di bidang Perpustakaan;
5. Belum adanya dana alokasi khusus bagi pengembangan Perpustakaan Desa yang berkelanjutan;

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki adalah :

1. Memiliki rencana strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi;

2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya prioritas program kerja;
4. Tersedianya Produk Hukum/Perda di Bidang Kearsipan
5. Tersedianya aplikasi Srikandi yang memudahkan kegiatan surat menyurat dari manual ke elektronik dan aplikasi Inlislite yang memudahkan para pemustaka untuk mengakses layanan perpustakaan secara online;
6. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi meskipun dari segi proporsionalitas belum memadai;

2.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang dan tantangan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang di lingkungan DPKD Provinsi Sulawesi Barat diantaranya :

1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

3. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengakses layanan Perpustakaan;
4. Adanya kerjasama yang baik dengan semua jenis Perpustakaan di Sulawesi Barat;

Selain itu analisis lingkungan eksternal juga menghadapi pada tantangan :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih baik;
2. Kesiapan aparat daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;
3. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakin profesional;
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
6. Image negatif sebagian masyarakat tentang Perpustakaan;
7. Masih kurangnya pemahaman para aparat penyelenggara negara tentang arti pentingnya arsip;
8. Belum tercukupinya tenaga Fungsional Arsiparis yang khusus menangani kearsipan di tiap unit kerja OPD Provinsi Sulawesi Barat dan tenaga Fungsional Pustakawan untuk mengelola setiap perpustakaan (Perpustakaan sekolah, perpustakaan Umum dan Perpustakaan perguruan tinggi) di Provinsi Sulawesi Barat.
9. Belum adanya sarana dan prasarana Kearsipan yang sesuai standar di tiap unit kerja OPD Prov.Sulbar.

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi barat maka berikut diuraikan isi-isu strategisyang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan :

2.3.3.1. Perpustakaan

Kondisi perpustakaan suatu bangsa merupakan cerminan atau refleksi dari tingkat kebudayaan serta tingkat peradaban yang telah dicapainya, dimana perpustakaan berkewajiban memperkenalkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat serta menanamkan sikap untuk terus belajar secara berkelanjutan sepanjang hayat.

Kini peran perpustakaan mulai tergeser dengan adanya internet. Bagi sebagian orang datang ke perpustakaan menjadi tambah malas aja, apalagi bagi yang pernah datang ke perpustakaan dan mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya perpustakaan yang mereka datangi tidak mempunyai alat penelusuran, koleksi yang tidak lengkap dan up to date serta tidak tertata dengan baik, perpustakaan kotor, letaknya sulit dijangkau dsb. Celakanya seperti itulah kondisi perpustakaan selama ini, tidak heran apabila perpustakaan semakin ditinggal oleh masyarakat pencari informasi dan internet menjadi primadona.

Perkembangan internet dan kemajuan teknologi informasi janganlah dipandang sebagai halangan atau saingan dalam pengembangan perpustakaan namun sistem pengelolaan perpustakaan tersebut harus diperlakukan sebagai sistem yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar dan preferensi pemakainya. Olehnya itu internet bisa dijadikan sebagai salah satu layanan perpustakaan untuk menarik minat orang datang ke perpustakaan.

Saat ini minat baca khususnya di kalangan pelajar dirasakan terus menurun, untuk itu langkah untuk meningkatkan minat baca harus segera dilakukan. Berbagai langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan menambahkan koleksi buku yang ada dengan buku-buku yang menarik minat masyarakat, melengkapi fasilitas perpustakaan dan mewujudkan Pustakawan

sahabat pelanggan dan yang tidak kalah penting adalah kenyamanan dan daya tarik serta letak dari pada gedung perpustakaan itu sendiri harus mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain hal tersebut, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca adalah dengan mendirikan Perpustakaan Desa dan menjadikan Perpustakaan Desa sebagai ujung tombak, dimana jumlah penduduk terbesar berada di pedesaan dan selama ini masyarakat yang berada di Desa sangat kesulitan mendapatkan buku bacaan. Oleh karena itu untuk membangun perpustakaan dan

meningkatkan minat baca selayaknya dimulai dari pedesaan termasuk pembangunan gedung pustaka itu sendiri. Untuk menjadikan Perpustakaan Desa sebagai ujung tombak tentu harus dilakukan pembinaan dan membangkitkan kembali fungsi perpustakaan itu sendiri sebagai gudang ilmu.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diupayakan untuk membangun sebuah Perpustakaan Umum Provinsi yang layak dan ideal sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan segera melakukan percepatan pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan di seluruh Desa/Kelurahan se Provinsi Sulawesi Barat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan juga Desa/Kelurahan.

2.3.3.2. Kearsipan

Tidak bias dipungkir bahwa kondisi arsip di instansi- instansi pemerintah kurang mendapat perhatian semestinya dari berbagai tingkat manajemen pemerintahan yang disebabkan berbagai hal mulai dari kurangnya pemahaman mengenai arsip dan teknis pengelolaannya sampai dengan kurangnya tenaga arsiparis yang memenuhi standar kualifikasi serta tidak adanya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan aturan dan kaidah - kaidah di bidang Kearsipan. Hal ini menyebabkan tidak tertatanya arsip dengan baik, rusak, hilang dan sukar penemuannya kembali jika suatu waktu diperlukan kembali.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya yang mendasar yaitu sebagai berikut :

1. Perlu segera ditetapkan Perda yang mengatur penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Diperlukan upaya pembinaan khusus terhadap tenaga pengelola arsip baik yang ada di Lembaga Kearsipan maupun yang ada di OPD lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.
3. Komitmen dari pimpinan terhadap tenaga pengelola arsip (Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis);
4. Pembangunan Depot Arsip.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan Rancangan Awal usulan RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat sesuai Tabel 3 berikut ini : *(Tabel 3 Terlampir)*

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program kegiatan dari masyarakat yang merupakan salah satu instrument penyusunan perencanaan pembangunan dengan system partisipasi langsung masyarakat melalui musrenbang yang dimulai pada tingkat Lingkungan/Dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan serta Kabupaten sampai dengan musrenbang tingkat Nasional.

Setelah mengikuti beberapa kegiatan musrenbang, maka terdapat usulan dari masyarakat yang terkait dengan permohonan bantuan koleksi perpustakaan Desa/Kelurahan dan kegiatan yang melibatkan penggiat literasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya gemar membaca, melalui;
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
2. Meningkatkan mutu semua jenis perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, melalui:
 - a. Pengembangan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan penduduk;
 - b. Pengembangan tenaga perpustakaan sesuai dengan penduduk yang dilayani;
 - c. Peningkatan ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai Lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - g. Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - h. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
 - i. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
3. Meningkatkan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara, melalui:
 - a. Konservasi fisik bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara;

- b. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara;
- c. Peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional.

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (PT Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi Politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan/tokoh nasional;
2. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan
4. Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatkan kecerdasan masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen;
4. Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan;
5. Mengembangkan SDM perpustakaan dan kearsipan.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yaitu:

1. Terwujudnya gemar membaca pada masyarakat;
2. Meningkatnya Sumber Daya Perpustakaan;
3. Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan;
4. Terwujudnya Penyelamatan Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sejarah dan Pertanggungjawaban Daerah;
5. Meningkatnya Sumber Daya Kearsipan;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas perpustakaan dan kearsipan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat, maka program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 ini terdiri dari 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan serta 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 1.3.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan/Material;
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 1.4.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pembinaan Perpustakaan
 - 2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
 - 2.1.1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi;
 - 2.1.2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 2.1.3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 2.1.4. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
 - 2.1.5. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
 - 2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
 - 2.2.1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
 - 2.2.2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - 2.2.3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - 3.1. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
 - 3.1.1. Pengehimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4. Program Pengelolaan Arsip
 - 4.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - 4.1.1. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
 - 4.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - 4.2.1. Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

4.3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

4.3.1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN

4.3.2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah provinsi.

Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dapat di lihat pada Tabel 4 berikut : *(Tabel 4 Terlampir)*

BAB IV

PENUTUP

Salah satu dokumen perencanaan yang dimiliki oleh OPD di pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai fungsi pembangunan adalah dokumen Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini yang akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu.

Renja OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

